



Pembina

H. Suhajar Diantoro

Penasehat

Ermaya Suradinata

Sadu Wasistiono

Wirman Syafri

Penanggungjawab

Khasan Effendy

Pimpinan Redaksi

Aries Djaenuri

Bambang Supriyadi

Anggota Redaksi

Hasan Ahmad

A. Masrich

Mulyadi

Gede Bhayu Dananjaya

Sri Sundari

Djuhairiyah

Maria Ekowati

Romi Saputra

Hasbullah

Staf Redaksi

Triyanto

Dede Saidah

Deded Mulyana

Dudi Wiguna

Neneng Juariyah

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang terhormat, dalam kesempatan ini *Jurnal Witaradya* diterbitkan dengan tema pokok pemerintahan, baik mencakup konsep maupun berbagai hasil penelitian. Konsep dan hasil penelitian merupakan pengembangan dan pendalaman dari berbagai studi yang diuji secara khusus dan mendalam di bidang manajemen pemerintahan.

Harapannya adalah materi yang disajikan dalam Jurnal ini dapat bermanfaat guna menambah wawasan informasi dan pengetahuan, bagi ilmunan, praktisi, dan pecinta kajian ilmu pemerintahan. Selamat membaca, dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu sangat kami harapkan.

Salam,

Redaksi,

REDAKSI

Jurnal Witaradya



Program Pascasarjana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Jl. Raya Ir. Soekarno Km. 20 Telp/Fax: (022) 7781576 Sumedang Jawa Barat 45363

e-mail: jurnalwitaradya@pps.ipdn.ac.id



DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi.....	iii
◆ Yuswandi A. Temenggung Perkembangan Esensi Perencanaan Pembangunan Indonesia dan Jepang	1 - 14
◆ David Mathias Yamonaha Hulu Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan Kota "Samaeri" (Studi di Pemerintah Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara)	15 - 25
◆ Afni Safitri Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai (Studi pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara)	27 - 45
◆ Anwar Basri Selang Pengembangan Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate	47 - 56
◆ Bastian Telaumbanua Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli)	57 - 62
◆ Bob Woriori Evaluasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dari Bupati kepada Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen Provinsi Papua	63 - 70
◆ Deslawati Zega Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Gunungsitoli	71 - 80
◆ Eko Ary Yanto Tello Zebua Strategi Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah	

PERKEMBANGAN ESENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA DAN JEPANG

Oleh: Yuswandi A. Temenggung

ABSTRAK: Perencanaan merupakan proses kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam mencapai tujuan individu maupun organisasi semakin tinggi kesiapan perencanaan dalam kegiatan cenderung semakin akses berbagai dimensi. Proses menuju output kegiatan pada kerja perencanaan dengan dua pendekatan, *Pertama:* Top Down yaitu strategi yang terukur dan sistematis diramu dan dilakukan oleh pemerintah ada lembaga pusat. *Kedua:* Botom Up yaitu pola dan strategi yang dihimpun dan di akses dari bawah atau dari berbagai cita-cita dan harapan masyarakat.

Rancang bangun bahan dan material dikelola dan diakses ke atas untuk kepentingan luas dan generalis dengan pola Top Down and Botom Up merupakan model atau pola yang terukur dan sistematis untuk mengawal kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Perlu diusut bahwa tujuan organisasi dengan tujuan individu atau anggotanya dilakukan secara berimpit artinya keberhasilan organisasi berimbang pada keberhasilan lain dan kesejahteraan anggotanya. Model Top Down dan Button Up tersebut prinsipnya semua mengawal kegiatan *pra-proses* dan *pasca-kegiatan* yang secara linier setiap kegiatan cenderung ada masalah dan setiap masalah diberikan solusi sejalan dengan dinamika kegiatan dan masalah pada *pra-* selesaikan pada area dan medan tersebut, demikian juga proses termasuk *pasca* kegiatan yang secara prinsip dilakukan secara menyeluruh kendala dan upaya yang dilakukan secara integral dengan pola pengembangan perencanaan baik pemerintah Indonesia maupun Jepang.

Kata Kunci: perencanaan, sistematis, pemerintah, Indonesia, Jepang

ABSTRACT: Planning is a process that terstruktur and systematic activity in individuals and organizations achieve higher readiness planning activities tend to increasingly access a variety of dimensions. The process towards the output of activities in the work plan with the two approaches, First: Top Down is measured and systematic strategy formulated and carried out by the government is no central agency. Second: Botom Up namely patterns and strategies collected and accessed from below or from the various ideals and expectations of society.

The design of materials and material are managed and accessed up to generalist with broad interests and patterns of Top Down and Botom Up is a model or pattern that is measurable and systematic to oversee activities in accordance with the objectives of the organization. Needs to be investigated that the goals of the organization with the purpose of individuals or members performed coincides impact on organizational success means another success and welfare of its members. Models Top Down and Button Up is principle all escort activities of pre-process and post-activities linearly each activity are likely to have problems and each problem is given a solution in line with the dynamics of the activities and problems in pre-finish on the area and the terrain, as well as the process including post prinsif activities are carried out thoroughly constraints and efforts made integrally with the pattern of development planning Indonesian government and Japan.

Key Words: *planning, systematic, government, Indonesian, Japan*

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan Indonesia mengalami pluktuatif sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan di era orde lama perencanaan pembangunan berorientasi

membangun kesatuan dan persatuan dalam menjaga negara berdaulat.

Kondisi tersebut di implementasi dalam bentuk sistem *presidentil - parlementer* yang memberi warna dalam menjalankan

sistem pemerintahan dan pembangunan. Di era pemerintahan orde baru perencanaan pembangunan dilakukan secara priodik lima tahun.

Sementara dalam era reformasi perencanaan pembangunan Inklude termuat dalam visi misi presiden dengan tetap mengacu pada UUD'45 dan Pancasila dengan titik utama penjabaran sesuai harapan dan dinamika masyarakat. Lihat fakta empiris dalam kasus pembangunan imfra struktur dan sufra struktur.

Tahun 2005 hingga tahun 2025 Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelebagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari:

1. RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,
2. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014,
3. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019,
4. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Pola dan proses jalan tol berjalan secara sustainable dari presiden Habibi, Abdurahman Wahid, Megawati, Bambang Yudoyono dan saat ini Jokowi. Pola pembangunan bersumber dari APBN dan Investor lokal maupun Asing yang dikelola. Yang menjadi Target Jalan Tol di Sumatera seluas 800 Km Salah satu ruas jalan lintas Sumatera.

Jakarta, *baranews.co* Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer pada periode 2015-2019. Target itu disebutkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, jalan tol sepanjang itu terdiri dari 800 kilometer (km) di Sumatera dan 200 km di Jawa dan Indonesia bagian timur.

Djoko mengemukakan hal itu sesuai penandatanganan perjanjian perusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,7 kilometer (km) itu merupakan salah satu ruas jalan tol di Sumatera. Pembangunannya dibagi menjadi dua seksi. Seksi I meliputi daerah Tanjung Morawa-Perbarakan (Deli Serdang)-Kualanamu (Deli Serdang) sepanjang 17,80 kilometer. Adapun seksi II meliputi Lubuk Pakam (Deli Serdang)-Tebing Tinggi.

Proyek tersebut dikerjakan konsorsium PT Jasamarga Kualanamu Tol dengan biaya investasi Rp 4,1 triliun. "Saat ini, pembebasan lahan mencapai 83 persen. Saya berharap untuk seksi I bisa selesai pada 2016 dan seksi II selesai pada 2017," ujar Djoko.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol A Gani Ghazali mengatakan, pembangunan jalan tol di Sumatera itu juga mendukung rancangan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Jalan tol yang membujur mulai dari Aceh hingga Lampung itu panjangnya 2.771 km yang dibagi menjadi 23 ruas. Menurut rencana, pembangunannya dilakukan secara bertahap hingga 2025.

Pengerjaan dimulai di empat ruas, yakni Pekanbaru-Dumai (135 km), Indralaya-Palembang (22 km), Medan-Binjai (15,8 km), dan Bakauheni-Terbangi Besar (150 km). Di Jawa, tambah Gani, proyek jalan tol antara lain Semarang-Solo (50 km), Solo-Ngawi (90 km), dan Ngawi-Kertosono (87 km). Adapun di Indonesia bagian timur meliputi Tol Kalimantan-Samarinda (99 km) dan Manado-Bitung (41 km).

Direktur Utama PT Jasa Marga Adhityawarman menyatakan siap berperan dalam proyek pembangunan jalan tol yang ditargetkan pemerintah itu. PT Jasa Marga, kata Adhityawarman, saat ini sedang menggarap proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, dan Surabaya-Mojokerto. (Sumber: *Jakarta, baranews.co*)

IKTISAR (PROYEK PEMBANGUNAN PLAZA PERAIRAN) DAM I OKASHIGAWA

1. Iktisar Dam I Oksashigawa

Penanggulangan banjir terpadu di aliran sungai mamagawa Yang dimaksud penanggulangan terpadu adalah penanggulangan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap bencana banjir yang meliputi seluruh aliran sungai, mempertahankan fungsi daerah disekitar sungai sebagai sumber air dan sebagai tempat permainan air, selain pembangunan, pemeliharaan dan renopasi daerah aliran sungai, fasilitas jalan dan dam.

Prefektur Chiba, sungai mamagawa ditunjuk oleh kementerian kontruksi sebagai sungai khusus penanggulangan banjir terpadu sejak tahun 1979. Kemudian pada tahun 1980 dibentuk dewan kerjasama penanggulangan terpadu daerah aliran sungai mamagawa yang meliputi 4 kota (Kota Ichikawa, Kota Matsudo, Kota Kamagaya dan Kota Funabashi), dengan tujuan untuk tempat membicarakan secara harmonis dan berkelanjutan tentang penanganan banjir secara terpadu.

Penanggulangan banjir terpadu daerah aliran mamagawa bertujuan utama untuk menyediakan sarana yang dapat mengantisipasi curah hujan 50 mm/jam, membangun Dam dan tempat penampungan air di sekolah-sekolah di kota Ichikawa, serta penyediaan regulasi bantuan kepada bangunan yang terendam air hujan.

2. Dam I (pertama) Okashigawa

Prefektur Chiba merencanakan sebuah proyek penanggulangan banjir terpadu secara berkelanjutan, dengan pembuatan Dam untuk mengatur debit air kota Okshigawa di ujung daerah *Bokke-cho* blok 4, yang merupakan permainan air yang aliran sedang, dengan tujuan untuk mengantisipasi bencana banjir di daerah hilir sungai mamagawa.

Rencana pembangunan Dam I Okshigawa ini meliputi daerah 16 ha, tempat penampungan air sebesar 254.000 m³ yang dapat menampung curah hujan 50 mm/jam. Sejak 1979 proyek dapat berjalan lancar berkat pemahaman dan kerja sama para pemilik tanah yang dijadikan tempat proyek tersebut.

Bagi kota Ichikawa sendiri dari Dam Okshigawa bukan hanya mendapatkan manfaat dari sisi banjir saja, tetapi sejak tahun anggaran 1994 juga mendapatkan dorongan untuk melakukan pemikiran yang berkelanjutan tentang bagaimana seharusnya menyesuaikan pembangunan Dam dalam program pembangunan kota. Proyek Dam Okashigawa yang dimulai tahun anggaran 1994 merupakan *open space* (ruang terbuka) yang sangat penting untuk penghijauan dan penjagaan kelembaban kota. Berdasarkan penandatanganan persetujuan proposal pembangunan ber"pola kreasi lingkungan alam" yang diajukan oleh prefektur chiba, kota Ichikawa mengajukan proposal permohonan pengerjaan proyek tersebut ke prefektur Chiba di tahun anggaran 1994, selain itu juga memuat artikel-artikel tentang pembangunan dan Okashigawa berpola kreasi lingkungan alam di lembar bulanan berita kota "Kouhou Ichikawa"

Kementerian transportasi dan pertanian nasional membuat "proyek pembangunan plaza perairan" sejak tahun anggaran 1996 dengan tujuan untuk menumbuhkan ide "perairan yang meriah" sebagai daerah pusat utama melalui pembangunan di daerah perairan di kampung, desa dan kota untuk memaksimalkan daya tarik tersebut.

Setelah menerima proposal ini, dengan nama gabungan kota Ichigawa dan prekfetur Chiba, kota Ichigawa pada tahun anggaran 1996 mengajukan pendaftaran, dan pada tahun anggaran 1997 menerima pemberitahuan persetujuan proyek yang ditunjuk oleh kementerian kontruksi.

Kemudian pada tahun anggaran 1998, kota Ichigawa menetapkan "surat persetujuan" atas poin-poin dasar rencana proyek pembangunan plaza perairan bersama prefektur Chiba.

Fenomena ditunjukkannya kota Ichigawa dan prefektur Chiba sebagai pelaksana proyek pembangunan plaza perairan, pembangunan Dam Okashigawa yang semula bertujuan sekedar untuk penanggulangan banjir saja, meluas menjadi prasarana berpola lingkungan alam yang ramah lingkungan air. Pelaksanaan proyek dilakukan secara bersama-sama oleh prefektur Chiba dan kota Ichigawa, dengan tugas masing-masing adalah daerah lokal (kota Ichigawa) sebagai pelaku utama pembangunan daerah utama disekitar Dam, sedangkan otoritas manajemen sungai (prefektur Chiba) adalah bertugas menyeleraskan pembangunan sungai-sungai seperlunya sesuai dengan prioritas, sesuai dengan kemajuan pembangunan dasar yang dilakukan oleh kampung, desa dan kota.

Kemudian tahun anggaran 2000 pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk menetapkan rancangan dasar pembangunan, oprasional dan manajemen setelah selesai pembangunan, yang dilakukan melalui workshop yang melibatkan partisipasi masyarakat. Bina Marga sebagai kepanjangan pemerintah demikian juga dengan kasus-kasus pembangunan lainnya baik non fisik maupun fisik termasuk Inprastruktur gedung, sarana umum, teknologi pertanian dan seterusnya. Demikian halnya dengan pemerintah Jepang melakukan pembangunan Inpra dan supra strukturnya dikelola secara nasional dalam membangun bangsa Jepang dalam sistem sustainable dan berbasis kebutuhan negara dan rakyat. Lihat pembangunan Melalui kerangka dasar tersebut bahwa peneliti mengungkap konsep dasar tentang perencanaan secara strategis pembangunan nasional baik pada pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang.

ESENSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

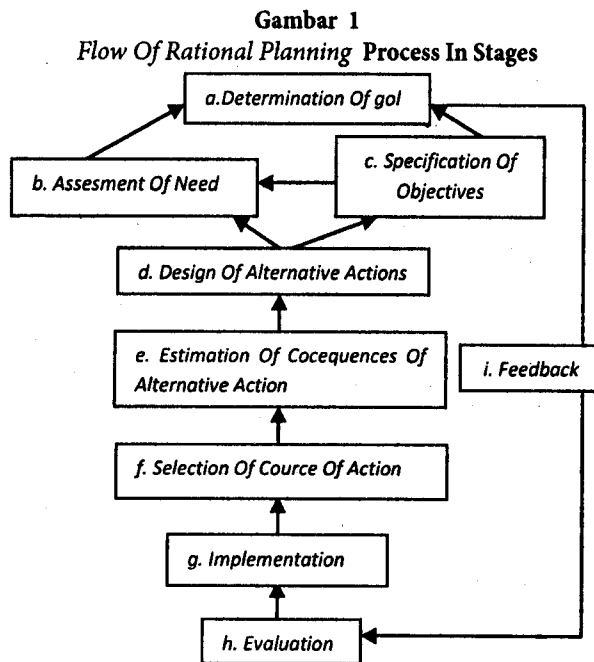
Esensi perencanaan berarti penyusunan rencana berupa konsep, cerita, uraian dst atau pembuat rencana yang berarti merencanakan, rancangan, perencanaan, proses, pembuatan, merencanakan akan dicapai pertumbuhan yang efisien dan teratur. Pemikiran tersebut

menunjukkan bahwa perencanaan menegaskan beberapa konsep yaitu proses yang terukur yang sistematis yang mengarah pada output yang jelas dalam pencapaian tujuan di bawah ini dijelaskan beberapa pandangan tentang perencanaan:

1. Nawawi (2010:29-32) perencanaan adalah:
 - a. Proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan.
 - b. Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang melakukannya.
 - c. Perencanaan adalah kegiatan persiapan yang merumuskan dan menetapkan keputusan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan secara terarah pada suatu tujuan.
2. Menurut Kay dan Alder dalam Rustiadi (2011:335) Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
3. Sumodiningrat (1999:2) menyebut pentingnya peran perencanaan di dalam pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan jalan untuk mewujudkan aspirasi tuntutan masyarakat, diberbagai negara yang sedang berkembang, dengan keterbatasan sumberdaya ekonomi dana prasarana, perencanaan pembangunan diyakini sebagai suatu cara yang paling efektif yang efisien untuk menetapkan arah pembangunan.
4. Salusu dalam Salam (2007:155) pentingnya Perencanaan Strategis bagi pemerintah daerah karena disana terlihat dengan jelas pelayanan pimpinan daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerja. Perencanaan strategis akan membantu menentukan arah masa depan daerahnya, Kecamatannya, Desa dan Kelurahanya. Dengan melaksanakan rencana strateghis yang tepat, para eksekutif daerah dapat lebih meningkatkan kemampuan pejabat-pejabatnya dalam mengevaluasi, memilih,

- dan mengimplementasikan berbagai kegiatan yang perlu dibiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Tarigan (2005:21), perencanaan dalam pengertian sederhana, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Tarigan juga melihat perencanaan dengan dipergunakan faktor internal dan juga eksternal (2005:3) perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini meramalkan perkembangan berbagai faktor Noncontrollable yang relevan memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan saran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut Winardi (2000:230) Perencanaan merupakan landasan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya lebih jauh dikatakan, perencanaan merupakan sebuah fungsi manajemen yang fundamental serta primer. Yang merupakan landasan untuk pelaksanaan tugas seorang menejer.
 6. Menurut Pratiwi dkk (2011:438) bahwa: Musrembang merupakan media penting warga untuk menyalurkan aspirasi ketika pemerintah menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) juga merupakan sarana pemerintah memperoleh masukan untuk membuat investasi pembangunan kota secara menyeluruh.
 7. Rumusan kalimatnya khususnya Pasal 63 sebagai berikut:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Ayat (2) perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Dersa, (Pasal 63 ayat. 1, 2, 3, PP 72/2005).
 8. Lincoln dkk (2011:24-25) menegaskan bahwa; Sebagai bagian dari penyelenggaraan desa, desa diwajibkan untuk memiliki perencanaan pembangunan desa yang merupakan bagian terintegrasi dari sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.
 9. Makmur (2013:253) menyatakan, kegagalan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan karena para pelaku dalam bidang pembangunan dalam melaksanakan serangkaian tindakan senantiasa terjadi ketidakselaraskan, ketidaksesuaian, kontradiksi antara pelaku pembangunan itu sendiri dengan pengguna hasil-hasil pembangunan.
 10. Nitisastro (2010:10) bahwa;
Perencanaan pembangunan itu berkisar pada dua hal, yakni : *pertama*, penentuan pilihan secara sadar mengenai berbagai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien, serta rasional guna mencapai berbagai tujuan tersebut.
 11. *According to Conyers (1984: 5) Definition of development planning can be seen from several aspects. From the aspect of activity states that "planning involves matters relating to decisions or choices regarding how to utilize existing resources as much as possible in order to achieve certain goals or facts that no future".*
 12. *Mayer (1985: 16) adds that the plan is closely related to policy-making (policy making). In fact, the two are often interchangeable. According to Mayer of the difference is due to the historical development of literature and not in the meaning attached to the term. James E Anderson (1978: 3) says that the policy is "a purposive course of action Followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern".*
Chronology of Regional Planning According to Mayer (1985: 104), for a planning model that

rasional of 9 (nine) steps are presented in the following figure:



Sumber: Policy and Progam Planing, Robert Mayer 1985.

Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut. Partisipasi diartikan oleh World Bank (1996) sebagai "a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and the decision and resources which affect them". (dalam Brinkerhoff, 2002:53).

13. Pembangunan yang bersifat partisipatif menuntut masing-masing aktor untuk berinteraksi dengan membentuk pola kemitraan seperti disampaikan oleh Rudqvist and Woodford (1994) bahwa :

"Participatory development stands for a partnership which is build upon thebasis of a dialogue among the various actors (stakeholders), during which the'agenda' is set jointly, and local views and indigeous knowledge aredeliberately sought and respected. This implies negotiation rather than thedominance of an externally set project agenda" (dalam Cornwall, 2000: 36).

Pemahaman di atas Penulis berpendapat bahwa: Perencanaan pembangunan merupakan chois atau pilihan bagi pengambil kebijakan dengan mempertimbangkan sumber daya

manusia, sumber daya alami, infra struktur, sub sumber dana dan peluang serta tantangan kesejahteraan bagi perkembangan masyarakat dalam bingkai negara.

METODE KAJIAN

Metode kajian penelitian dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi koperatif, studi kepustakaan yaitu upaya menganalis data dengan menggunakan pendekatan dan bobot literatur yang sejalan dengan tofik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopèdia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986).

Studi kajian dalam kontek perbandingan perencanaan pembangunan nasional indonesia dengan jepang yaitu menggunakan metode koperatif yaitu membandingkan esensi perencanaan pembangunan kedua negara. Hal ini sejalan dengan Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif merupakan sejenis penelitian